



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKIP 2025**

Kecamatan Bekasi Selatan
Kota Bekasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun Pelaporan 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKIP ini merupakan bentuk komitmen Kecamatan Bekasi Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran.

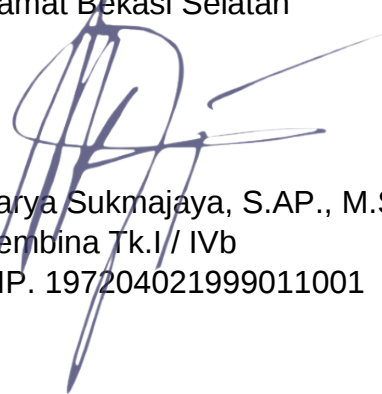
LKIP Kecamatan Bekasi Selatan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja utama, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai media evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi, sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya LKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan, akuntabel, dan objektif mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan Bekasi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik Pemerintah Kota Bekasi, perangkat daerah terkait, unsur TNI/Polri, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya di Kelurahan Pekayonjaya, Kayuringinjaya, Jakasetia, Jakamulya, dan Margajaya. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan di masa yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi yang berguna dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang akuntabel.

Bekasi, 09 Januari 2026
Camat Bekasi Selatan



Karya Sukmajaya, S.AP., M.Si
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 197204021999011001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Kecamatan Bekasi Selatan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.

Penilaian dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Upaya tersebut juga sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penguatan akuntabilitas kinerja memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, termasuk melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LKIP berfungsi sebagai dokumen laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja dan dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas kinerja menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bekasi Selatan.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan capaian kinerja dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bekasi Selatan kepada Walikota Bekasi dan masyarakat.

Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2024–2026, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024–2026, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kecamatan Bekasi Selatan Tahun Anggaran 2025.

LKIP Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Selatan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024–2026 dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025. Indikator Kinerja Utama tersebut secara langsung mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024–2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Selatan meliputi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bekasi Selatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas manajemen kinerja serta meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan. Sasaran strategis tersebut ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi I RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024–2026, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menunjang pencapaian indikator kepuasan masyarakat.

Selain itu, Kecamatan Bekasi Selatan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama berupa persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Bekasi Selatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat. Sasaran strategis tersebut mendukung pencapaian Misi V RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024–2026, yaitu membangun dan mengembangkan kehidupan kota yang aman, cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman, khususnya dalam menunjang pencapaian indikator penurunan pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Dengan memperhatikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada tahun sebelumnya, Kecamatan Bekasi Selatan pada Tahun 2025 berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, baik terhadap indikator yang telah mencapai target maupun terhadap indikator yang memerlukan peningkatan kinerja seiring dengan meningkatnya target yang ditetapkan dalam Renstra. LKIP Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang komprehensif serta dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Kecamatan Bekasi Selatan menginisiasi Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komperhensi mengenai kinerja Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 ini.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Selatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Sebagai organisasi kewilayahan (territorial organization), kecamatan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum serta pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut berkontribusi terhadap dinamika pembangunan Kota Bekasi, baik pada lingkup lokal, regional, maupun nasional, dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan melaksanakan berbagai

upaya melalui penguatan integrasi, peningkatan sosialisasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, serta pembinaan aparatur.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kecamatan, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kota Bekasi, yang menempatkan kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Bekasi Selatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Selatan terdiri atas Camat sebagai pimpinan, Sekretaris Kecamatan, serta perangkat kecamatan di bawahnya. Sekretariat Kecamatan terdiri dari dua subbagian, yaitu Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Keuangan. Unsur pelaksana teknis terdiri dari lima seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kecamatan Bekasi Selatan terdiri atas 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Kayuringin Jaya, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Jakasetia, Kelurahan Jakamulya, dan Kelurahan Margajaya.

Kecamatan Bekasi Selatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di wilayah kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota di kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi, Lurah, serta pejabat struktural lainnya dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Kelurahan, yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban;
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Bekasi Selatan merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak dipusat Pemerintahan kota Bekasi, yang dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Letak Kecamatan Bekasi Selatan sangat strategis, dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria
Sebelah Selatan	: Kecamatan Jatiasih
Sebelah Timur	: Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu
Sebelah Barat	: Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Bekasi Selatan terdiri atas 94 Rukun Warga (RW) dan 628 Rukun Tetangga (RT). Banyaknya kawasan perumahan di wilayah ini berpengaruh terhadap tingkat kemajemukan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana umum melalui pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) yang disediakan oleh para pengembang perumahan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan fungsi pada Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, serta Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat mencakup aspek pembangunan di tingkat kecamatan. Pembangunan yang dilaksanakan diarahkan

agar memberikan dampak nyata kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban, keindahan, dan kenyamanan (K3). Dalam mendukung hal tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan berperan dalam mewujudkan zona-zona K3 sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, penyederhanaan alur birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik, menjadi salah satu fokus utama, dengan memanfaatkan kedekatan geografis kecamatan dan kelurahan sebagai unit pelayanan terdepan bagi masyarakat.

Upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dilaksanakan melalui pendekatan manajemen yang bersifat parsial dan sektoral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistemik dan sistematis dengan menitikberatkan pada aspek-aspek fundamental dan strategis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi memperoleh kesempatan dan peluang yang setara untuk berperan aktif dalam proses pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bekasi Selatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bekasi Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Bekasi Selatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Bekasi Selatan
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Bekasi Selatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bekasi Selatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bekasi Selatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bekasi Selatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bekasi Selatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bekasi Selatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bekasi Selatan
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Jakasetia
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Jakamulya
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Pekayonjaya
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Kayuringinjaya

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kelurahan Margajaya
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jakasetia
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jakamulya
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pekayonjaya
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kayuringinjaya

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margajaya
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jakasetia
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jakamulya
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pekayonjaya
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kayuringinjaya
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Bekasi Selatan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bekasi Selatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jakasetia
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jakamulya
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pekayonjaya
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kayuringinjaya
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Margajaya
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bekasi Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Kecamatan Bekasi Selatan berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis pelayanan di

Kecamatan Bekasi Selatan terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari Kecamatan Bekasi Selatan dan produk dimana Kecamatan Bekasi Selatan berperan

dalam hal fasilitasi pelayanan. Produk layanan yang merupakan hasil dari Kecamatan Bekasi Selatan adalah produk pelayanan yang berasal dari 5 seksi yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Waris;
2. Rekomendasi Nikah Non Muslim;
3. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
4. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
5. Surat Keterangan Belum Menikah dan;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Sedangkan dalam mendukung pelayanan yang ada di dinas teknis terkait guna memangkas alur birokrasi yang rumit. Kecamatan Bekasi Selatan bertugas memfasilitasi pelayanan kependudukan yang menjadi produk layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti : Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP dan Akte Kelahiran. Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang Nyaman dan Sejahtera.

1.5 Sisematika Penyajian

Sistematika LKIP Kecamatan Bekasi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PRENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan strategis dalam merumuskan rencana yang menggambarkan tujuan, sasaran, serta program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perencanaan kinerja dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan dan memuat target capaian kinerja tahunan untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan secara terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran, serta menjadi bentuk komitmen instansi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Perencanaan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Bekasi Selatan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Indikator kinerja yang ditetapkan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025, dengan target kinerja yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%) atau jumlah unit, sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program strategis perangkat daerah. Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis tersebut, yang memuat program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan dilakukan melalui tahapan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang krusial bagi instansi pemerintah dalam merespons dinamika dan tuntutan lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Melalui perencanaan strategis yang terarah dan berkesinambungan, Kecamatan Bekasi Selatan diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan potensi, peluang, serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Bekasi Selatan merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Tujuan yang ditetapkan berorientasi pada terwujudnya estetika kota yang didukung infrastruktur yang memadai serta meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan. Perumusan tujuan ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta dinamika lingkungan strategis, sehingga mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara lebih spesifik sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan dirumuskan secara terukur dan berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LKM) aktif yang mendukung pelayanan publik, serta persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan. Sasaran tersebut digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024–2026, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82.98	83.83	84.7	85.6	86.52	87.47
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	%	70	72.5	75	77.5	80	82.5
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	1.00	1.02	1.04	1.06	1.08	1.10

1.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bekasi Selatan. Penetapan IKU dimaksudkan untuk menyediakan informasi kinerja yang akurat dan relevan sebagai dasar penyelenggaraan manajemen kinerja yang efektif, serta sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dalam rangka mengukur kinerja Kecamatan Bekasi Selatan, Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. IKU tersebut dirumuskan untuk mencerminkan capaian kinerja utama kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, Kecamatan Bekasi Selatan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sebagai indikator utama. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan menjadi tolok ukur keberhasilan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Selain itu, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan persentase Lembaga Kemasyarakatan (LKM) aktif yang mendukung pelayanan publik sebagai Indikator Kinerja Utama untuk mengukur tingkat partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator ini mencerminkan sinergi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan responsif.

Selanjutnya, untuk menilai efektivitas peningkatan pelayanan masyarakat dari waktu ke waktu, digunakan persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan. Indikator ini menunjukkan keberhasilan upaya perbaikan kinerja pelayanan secara berkelanjutan dan menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pada periode berikutnya.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan memiliki alat ukur yang jelas dan terukur dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat. Kecamatan Bekasi Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	IKU	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	TARGET
				ALASAN	FORMULASI		2025
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	%	Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bahwa pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan	(Jumlah LKM yang aktif / Jumlah LKM) x 100%	1. Seksi Ekbang 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Kesos 4. Seksi Permas	70%

				prioritas kebutuhan masyarakat desa.			
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bekasi Selatan adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. Seksi Ekbang 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Kesos 4. Seksi Permas 5. Seksi Trantib	1%

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, dengan memperhatikan isu-isu strategis terkait tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi serta hasil penjangkaran aspirasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan, dan kecamatan, maka ditetapkan sejumlah program yang menjadi penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Bekasi Selatan. Program-program tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan pada Tahun 2025 meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Pelaksanaan program-program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bekasi Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen kinerja antara Camat Bekasi Selatan selaku penerima amanah dengan Walikota Bekasi selaku pemberi amanah. Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang digunakan dalam proses evaluasi kinerja aparatur dan organisasi secara keseluruhan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, serta didukung dengan alokasi anggaran yang direncanakan per triwulan. Rincian sasaran kinerja, indikator, target, dan alokasi anggaran tersebut selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bekasi Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	70%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran per-Triwulan

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.177.139.000	5.754.648.283	6.618.649.712	4.969.919.784	5.833.921.221
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	311.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000	120.140.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	11.400.000	9.600.000	9.600.000	9.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	31.501.000	37.500.000	31.500.000	19.499.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	0	50.000.000	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.800.000	162.450.000	81.450.000	81.450.000	81.450.000
Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.127.345.840	558.586.520	558.578.520	558.578.520	451.602.280
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	32.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	104.875.000	48.375.000	48.375.000	48.375.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	25.750.000	24.750.000	24.750.000	24.750.000

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (kecamatan)	40.000.000	14.800.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	70.000.000	15.890.000	15.890.000	15.890.000	22.330.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	145.000.000	127.249.600	0	0	17.750.400
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	570.000.000	80.506.400	123.234.200	335.608.600	30.650.800
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	35.790.000	14.210.000	0	0
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000	0	0	35.000.000	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	75.000.000	35.990.000	0	35.990.000	3.020.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	50.000.000	11.855.000	19.890.000	12.935.000	5.320.000

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Vertikal di Wilayah Kecamatan					
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	0	24.607.000	25.393.000	0
		0	0	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Jakasetia)	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jakasetia)	200.000.000	0	0	200.000.000	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jakasetia)	4.279.761.600	504.906.000	2.731.886.000	538.063.200	504.906.400
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata (Jakasetia)	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
		0	0	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jakamulya	40.000.000	754.200	19.243.700	19.243.700	758.400

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jakamulya)	200.000.000	0	0	200.000.000	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jakamulya)	3.615.000.000	450.199.500	2.248.780.500	476.800.500	439.219.500
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata (Jakamulya)	40.000.000	0	40.000.000	0	0
		0	0	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Pekayon Jaya)	40.000.000	7.455.000	0	28.600.000	3.945.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pekayon Jaya)	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pekayon Jaya)	5.539.720.600	3.277.816.400	701.195.400	886.480.400	674.228.400
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Pekayon Jaya)	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
		0	0	0	0

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kayuringin Jaya	40.000.000	0	15.975.000	21.820.000	2.205.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kayuringin Jaya)	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kayuringin Jaya)	5.994.382.800	813.881.200	3.403.914.200	980.206.200	796.381.200
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata (Kayuringin Jaya)	40.000.000	0	40.000.000	0	0
		0	0	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Margajaya	30.000.000	0	15.295.000	2.350.000	12.355.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Margajaya)	200.000.000	0	200.000.000	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Margajaya)	1.661.592.000	219.898.800	399.898.800	819.898.800	221.895.600

Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi			
		Triwulan I	Triuwlan II	Triwulan III	Trwiwulan IV
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata (Margajaya)	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
	50.851.741.840	12.934.592.903	18.175.193.032	10.485.722.704	9.256.233.201

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bekasi Selatan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen kinerja yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029. Proses akuntabilitas kinerja ini diawali dengan penyusunan perencanaan strategis, penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bekasi Selatan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Rangkaian perencanaan dan pelaksanaan tersebut mencerminkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi yang dicapai.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bekasi Selatan pada Tahun 2025. Capaian kinerja ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme aparatur, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan secara berkelanjutan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi menetapkan sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029. Penetapan sasaran dan IKU tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sasaran yang ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 merupakan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk mempermudah interpretasi dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, digunakan nilai capaian kinerja yang disertai dengan makna penilaian sebagai dasar dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan.

Secara umum, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 terdapat capaian yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis beserta indikator kerjanya. Capaian tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis kinerja serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	70%	100%	142.85%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	3,3%	330%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Sasaran strategis meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKM) yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan diukur melalui indikator persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 70%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 142,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh LKM di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan telah berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan LKM, serta adanya pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan terhadap kelembagaan masyarakat.

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan diukur melalui indikator persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan. Pada Tahun 2025, target peningkatan yang ditetapkan sebesar 1%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 3,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 330%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta optimalisasi koordinasi pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 telah tercapai dengan sangat baik. Capaian yang melampaui target ini menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis : Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan

1. Indikator Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

Sasaran strategis meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan (LKM) yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan diukur melalui indikator persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik. Dalam pengukuran indikator ini, LKM dinyatakan aktif apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki dasar hukum dan Surat Keputusan (SK) yang sah, tertib secara administratif, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan dan pembangunan, serta menyampaikan laporan kegiatan secara rutin setiap bulan kepada kelurahan dan kecamatan.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi objek pengukuran meliputi kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari RT, RW, Posyandu, PKK, Imam Marbot, Majelis Ulama setempat (MUB), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Keaktifan Pokmas tersebut dinilai berdasarkan pemenuhan kriteria administratif, tingkat partisipasi dalam kegiatan, serta konsistensi pelaporan bulanan.

Pada Tahun 2025, target persentase LKM aktif yang ditetapkan sebesar 70%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 142,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh LKM di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan telah memenuhi kriteria keaktifan yang ditetapkan dan berperan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Capaian kinerja yang melampaui target tersebut mencerminkan keberhasilan Kecamatan Bekasi Selatan dalam melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan koordinasi dengan kelurahan dan masyarakat. Partisipasi aktif dan tertibnya pelaporan bulanan oleh LKM juga menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Melalui Capaian Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik diharapkan semua LKM di Kecamatan Bekasi Selatan dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan public yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan.

Tabel 3.4

Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase LKM Aktif

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	70%	100%	142.85%

Adapun faktor penyebab keberhasilan peningkatan capaian Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kejelasan regulasi dan dasar hukum LKM, di mana seluruh LKM telah memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah dan berlaku, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan terarah dan memiliki kepastian hukum.
2. Tertib administrasi kelembagaan, yang ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen administrasi LKM serta konsistensi dalam pencatatan kegiatan dan pelaporan secara rutin setiap bulan.
3. Pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan oleh kecamatan dan kelurahan, melalui koordinasi rutin, pendampingan teknis, dan monitoring terhadap kinerja LKM.
4. Tingginya partisipasi dan komitmen pengurus LKM dan Pokmas, termasuk RT, RW, Posyandu, PKK, Imam Marbot, MUB, LPM, dan BKM, dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan kegiatan kemasyarakatan.
5. Koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, baik antara kecamatan, kelurahan, dan LKM, maupun dengan unsur pendukung lainnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sinergis.
6. Meningkatnya pemahaman LKM terhadap peran dan fungsinya, khususnya dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan wilayah, sebagai hasil dari sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
7. Adanya sistem pelaporan bulanan yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pemantauan tingkat keaktifan LKM serta menjadi alat kontrol dan evaluasi kinerja kelembagaan masyarakat.

8. Dukungan lingkungan sosial yang kondusif dan partisipatif, di mana masyarakat memberikan respon positif terhadap peran LKM dan terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran dan Capaian untuk Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik

IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.119.162.000	20.984.935.188	99,36%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.844.162.000	20.713.985.188	99,38%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	116.175.000	96,81%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	180.000.000	90,00%

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	413.247.000	396.490.992	95,95%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.913.017.600	3.906.887.400	99,84%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.290.322.000	3.289.414.600	99,97%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.047.750.600	5.034.443.800	99,74%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.451.868.800	5.432.667.400	99,65%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.557.956.000	1.557.905.996	100,00%
	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	0	0,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	275.000.000	270.950.000	98,53%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100,00%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	75.000.000	70.950.000	94,60%

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp21.119.162.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.984.935.188,00 atau

99,36%, yang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program yang sangat tinggi dalam mendukung keaktifan Lembaga Kemasyarakatan (LKM).

Pada tingkat kegiatan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan menjadi kegiatan utama dengan pagu anggaran sebesar Rp20.844.162.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.713.985.188,00 atau 99,38%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sejumlah subkegiatan yang secara langsung mendorong peran aktif LKM dan kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah kelurahan.

Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp116.175.000,00 atau 96,81%. Subkegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan LKM dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif.

Selanjutnya, subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu Kelurahan Jakasetia, Jakamulya, Pekayonjaya, Kayuringinjaya, dan Margajaya, masing-masing dengan pagu anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi anggaran pada Kelurahan Jakasetia, Jakamulya, Pekayonjaya, dan Kayuringinjaya mencapai 100%, sedangkan pada Kelurahan Margajaya terealisasi sebesar 90%. Pelaksanaan subkegiatan ini mendorong keterlibatan aktif LKM dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan.

Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan di seluruh kelurahan dengan total pagu anggaran yang bervariasi, yaitu di Kelurahan Jakasetia sebesar Rp3.913.017.600,00 (realisasi 99,84%), Kelurahan Jakamulya sebesar Rp3.290.322.000,00 (realisasi 99,97%), Kelurahan Pekayonjaya sebesar Rp5.047.750.600,00 (realisasi 99,74%), Kelurahan Kayuringinjaya sebesar Rp5.451.868.800,00 (realisasi 99,65%), dan Kelurahan Margajaya sebesar Rp1.557.956.000,00 (realisasi 100%). Subkegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas LKM agar tertib administrasi, partisipatif, dan konsisten dalam pelaporan kegiatan bulanan.

Selain itu, subkegiatan Evaluasi Kelurahan memiliki pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,00 namun tidak terealisasi pada Tahun 2025. Ketidakterlaksanaan subkegiatan ini tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian IKU, mengingat capaian keaktifan LKM tetap terpenuhi melalui pelaksanaan subkegiatan lainnya.

Pada tingkat kecamatan, dilaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp275.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp270.950.000,00 atau 98,53%. Kegiatan ini didukung oleh subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di seluruh kelurahan, yaitu Jakasetia, Jakamulya, Pekayonjaya, Kayuringinjaya, dan Margajaya, masing-masing dengan pagu anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi 100%. Subkegiatan ini berperan dalam pembinaan, koordinasi, dan penguatan peran LKM di tingkat kelurahan.

Selain itu, subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.950.000,00 atau 94,60%. Subkegiatan ini mendukung keberlanjutan keaktifan LKM melalui penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan kelembagaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut telah berjalan efektif dan efisien, dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian IKU Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan

1. Indikator Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan Kecamatan Bekasi Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, yang tercermin dari peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Pada Tahun 2025, target persentase peningkatan kepuasan masyarakat yang ditetapkan sebesar 1%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 3,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 330%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan efektivitas pelayanan masyarakat yang

dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.

Peningkatan kepuasan masyarakat tersebut juga tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2025, target nilai IKM yang ditetapkan sebesar 82,98, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 84,93. Pencapaian nilai IKM tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja aparatur Kecamatan Bekasi Selatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh berbagai upaya perbaikan layanan, antara lain penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kedisiplinan dan responsivitas aparatur, serta penguatan koordinasi pelayanan antara kecamatan dan kelurahan. Selain itu, penerapan prinsip pelayanan yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

Capaian kinerja yang melampaui target ini menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil ini sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun-tahun berikutnya, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Tabel 3.5

Analisis Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	3,3%	330%

Adapun faktor penyebab keberhasilan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur pelayanan, yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), ketepatan waktu pelayanan, serta sikap ramah dan responsif dalam melayani masyarakat.

2. Penyederhanaan prosedur dan alur pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
3. Penguatan koordinasi pelayanan antara kecamatan dan kelurahan, yang memungkinkan penyelesaian permasalahan pelayanan masyarakat secara lebih efektif dan terintegrasi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan yang memadai dan nyaman bagi masyarakat.
5. Penerapan prinsip pelayanan yang transparan dan akuntabel, melalui kejelasan informasi persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkelanjutan, sehingga masukan dan keluhan masyarakat dapat dijadikan dasar perbaikan layanan.
7. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik pelayanan, baik melalui survei kepuasan maupun mekanisme pengaduan, yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.125.115.658	22.056.297.070	78,42%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.751.850	95,04%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.751.850	95,04%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.543.224.000	14.845.556.584	72,26%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.538.224.000	14.840.929.144	72,26%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.627.440	92,55%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.118.000	10.000.000	18,48%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.750.000	10.000.000	72,73%
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40.368.000	0	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.769.200	504.248.029	86,38%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.883.400	99,42%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	287.613.568	95,87%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.604.200	78.585.025	85,79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	33.333.000	66,67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.165.000	79.940.536	68,23%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.892.500	97,85%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.257.500	23.862.000	98,37%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.257.500	23.862.000	98,37%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.336.746.958	6.147.527.446	97,01%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.000.000	297.364.826	75,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.943.746.958	5.850.162.620	98,43%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.000.000	520.351.161	90,03%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	77.369.773	85,97%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	212.997.000	85,20%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000	80.300.000	91,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.684.388	99,79%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	282.500.000	272.915.100	96,61%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	242.500.000	238.495.100	98,35%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	42.500.000	42.500.000	100,00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jakasetia	40.000.000	38.384.000	95,96%

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jakamulya	40.000.000	39.999.800	100,00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pekayonjaya	40.000.000	39.204.000	98,01%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kayuringinjaya	40.000.000	39.995.000	99,99%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Margajaya	40.000.000	38.412.300	96,03%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000	34.420.000	86,05%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.000.000	34.420.000	86,05%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.800.000	43.645.000	71,78%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.800.000	43.645.000	71,78%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.800.000	43.645.000	71,78%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.050.000	34.686.000	82,49%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.050.000	34.686.000	82,49%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.050.000	34.686.000	82,49%

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan administrasi, koordinasi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, Kecamatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kepuasan masyarakat, antara lain melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Total pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut sebesar Rp28.125.115.658 dengan realisasi anggaran Rp22.056.297.070 atau sebesar 78,42 persen

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah difokuskan pada penguatan tata kelola perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemenuhan kebutuhan administrasi dan sarana pendukung pelayanan. Hal ini terlihat dari tingginya capaian pada kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah yang rata-rata mencapai di atas 90 persen realisasi anggaran, sehingga berdampak positif terhadap kelancaran pelayanan kepada masyarakat

Selain itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar 96,61 persen, yang menunjukkan komitmen kecamatan dalam menjaga kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta instansi vertikal di wilayah kecamatan.

Pemeliharaan sarana pelayanan umum di seluruh kelurahan menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat juga didukung oleh pelaksanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang berperan dalam menciptakan lingkungan kecamatan yang aman, tertib, dan kondusif. Meskipun realisasi kedua program tersebut masih perlu ditingkatkan, kegiatan koordinasi dengan unsur Forkopimcam dan instansi terkait telah memberikan kontribusi positif terhadap persepsi masyarakat atas kehadiran pemerintah di tingkat kecamatan

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan sejalan dengan target yang ditetapkan. Ke depan, kecamatan akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendorong peningkatan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 49.629.627.658.- pada penetapan APBDP Tahun 2025 dengan capaian sebesar 87,43% yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian per Program kecamatan Bekasi Selatan

Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Kecamatan Bekasi Selatan	49.629.627.658	43.392.478.358	87,43%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.119.162.000	20.984.935.188	99,36%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.125.115.658	22.056.297.070	78,42%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	282.500.000	272.915.100	96,61%

Program	Pagu	Realisasi	Capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.800.000	43.645.000	71,78%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.050.000	34.686.000	82,49%

Tabel 3.6
Capaian dan Realisasi Sub Kegiatan di Kecamatan Bekasi Selatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Kecamatan Bekasi Selatan	49.629.627.658	43.392.478.358	87%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.119.162.000	20.984.935.188	99,36%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.844.162.000	20.713.985.188	99,38%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	116.175.000	96,81%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasetia	200.000.000	200.000.000	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakamulya	200.000.000	200.000.000	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekayonjaya	200.000.000	200.000.000	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayuringinjaya	200.000.000	200.000.000	100,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margajaya	200.000.000	180.000.000	90,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	413.247.000	396.490.992	95,95%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia	3.913.017.600	3.906.887.400	99,84%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya	3.290.322.000	3.289.414.600	99,97%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya	5.047.750.600	5.034.443.800	99,74%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya	5.451.868.800	5.432.667.400	99,65%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya	1.557.956.000	1.557.905.996	100,00%
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	0	0,00%

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	275.000.000	270.950.000	98,53%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jakasetia	40.000.000	40.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jakamulya	40.000.000	40.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pekayonjaya	40.000.000	40.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kayuringinjaya	40.000.000	40.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Margajaya	40.000.000	40.000.000	100,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	75.000.000	70.950.000	94,60%
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.125.115.658	22.056.297.070	78,42%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.751.850	95,04%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.751.850	95,04%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.543.224.000	14.845.556.584	72,26%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.538.224.000	14.840.929.144	72,26%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.627.440	92,55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.118.000	10.000.000	18,48%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.750.000	10.000.000	72,73%
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40.368.000	0	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.769.200	504.248.029	86,38%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.883.400	99,42%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	287.613.568	95,87%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.604.200	78.585.025	85,79%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	33.333.000	66,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.165.000	79.940.536	68,23%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.892.500	97,85%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.257.500	23.862.000	98,37%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.257.500	23.862.000	98,37%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.336.746.958	6.147.527.446	97,01%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.000.000	297.364.826	75,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.943.746.958	5.850.162.620	98,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.000.000	520.351.161	90,03%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	77.369.773	85,97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	212.997.000	85,20%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000	80.300.000	91,25%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.684.388	99,79%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	282.500.000	272.915.100	96,61%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	242.500.000	238.495.100	98,35%

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	42.500.000	42.500.000	100,00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jakasetia	40.000.000	38.384.000	95,96%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jakamulya	40.000.000	39.999.800	100,00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pekayonjaya	40.000.000	39.204.000	98,01%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kayuringinjaya	40.000.000	39.995.000	99,99%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Margajaya	40.000.000	38.412.300	96,03%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000	34.420.000	86,05%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.000.000	34.420.000	86,05%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.800.000	43.645.000	71,78%

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.800.000	43.645.000	71,78%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.800.000	43.645.000	71,78%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.050.000	34.686.000	82,49%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.050.000	34.686.000	82,49%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.050.000	34.686.000	82,49%

Secara keseluruhan, pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bekasi Selatan mengelola anggaran sebesar Rp49.629.627.658 dengan realisasi Rp43.392.478.358 atau mencapai 87,43 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kecamatan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

Program dengan capaian tertinggi adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan realisasi sebesar 99,36 persen. Tingginya capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di seluruh kelurahan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang pada sebagian besar wilayah terealisasi 100 persen, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang rata-rata mencapai di atas 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat mampu dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga

Selain itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 96,61 persen. Program ini difokuskan pada koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kelurahan. Tingginya realisasi program ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam menjaga

keberlanjutan kualitas layanan publik dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 78,42 persen. Program ini berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional perangkat kecamatan melalui kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan. Meskipun beberapa subkegiatan belum terealisasi secara optimal, secara umum program ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan

Sementara itu, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum masing-masing mencapai realisasi sebesar 71,78 persen dan 82,49 persen. Program-program ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas sektor, sinergitas dengan unsur TNI/Polri, serta pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan program dan penganggaran yang matang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
2. Koordinasi yang efektif antara kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, dan instansi vertikal, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
3. Tingginya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di tingkat kelurahan, yang mendorong optimalisasi pelaksanaan program.
4. Komitmen dan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
5. Fokus pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga realisasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian kinerja yang sangat memuaskan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan peran serta masyarakat.

Capaian sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik berhasil mencapai realisasi 100% dari target 70%, dengan capaian kinerja sebesar 142,85%. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat, yang ditandai dengan tertibnya aspek administratif, keaktifan partisipasi, serta konsistensi pelaporan bulanan oleh LKM dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Selain itu, sasaran strategis meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase peningkatan kepuasan masyarakat mencapai 3,3% dari target 1%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 330%. Pencapaian tersebut diperkuat oleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melampaui target, yaitu sebesar 84,93 dari target 82,98. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tingginya capaian kinerja tersebut didukung oleh sinergi antara perencanaan yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan transparan, menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Bekasi Selatan.

Ke depan, Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih dengan terus melakukan

perbaikan berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. LKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2025 adalah tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut/

1. Kecamatan Bekasi Selatan akan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan (LKM) agar tetap aktif, tertib administrasi, partisipatif, dan konsisten dalam penyampaian laporan bulanan. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin, pendampingan teknis, serta evaluasi berkala terhadap kinerja LKM dan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan.
2. Dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, penegakan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur pelayanan. Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berikutnya.
3. Kecamatan Bekasi Selatan akan mengoptimalkan pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat dan mekanisme pengaduan sebagai dasar perbaikan layanan. Setiap masukan dan keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti secara sistematis dan terintegrasi dengan proses evaluasi kinerja.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi antara kecamatan dan kelurahan akan terus ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Kecamatan Bekasi Selatan akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, guna mendukung transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan diharapkan mampu mempertahankan kinerja yang telah dicapai, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas data dan informasi capaian kinerja merupakan salah satu strategi utama dalam mendukung terwujudnya pelaporan kinerja yang akurat, akuntabel, dan berkualitas. Pengumpulan data capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga pelaporan kinerja dapat selaras dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif serta memiliki pemahaman yang memadai terhadap arah dan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat ditempatkan sebagai bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan hingga keterlibatan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi acuan dan landasan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada periode pembangunan selanjutnya.